

Belasan Ribu Pelaku UMKM Daftar BPUM

SUKOHARJO (KR) - Empat hari menjelang penutupan pendaftaran program Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) tahun 2021 dari pemerintah pusat pada 20 April mdatang jumlah pendaftar mengalami lonjakan signifikan. Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Sukoharjo mencatat per 16 April mencapai 28.185 pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) mengajukan permohonan bantuan modal usaha sebesar Rp 1,2 juta karena terdampak pandemi virus Korona.

Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Sukoharjo Sutarmo, Jumat (16/4) mengatakan, minat pelaku UMKM mendaftarkan diri dalam program BPUM tahun 2021 untuk mendapat bantuan modal usaha sebesar Rp 1,2 juta sangat tinggi. Hal itu terbukti dengan adanya lonjakan jumlah pendaftar dari sebelumnya pada kisaran ratusan sekarang tembus puluhan ribu orang. Jumlah pendaftar dipastikan akan mengalami kenaikan lagi mengingat masih banyak pelaku UMKM sekarang sedang mengurus proses pendaftaran dengan melengkapi persyaratan.

Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Sukoharjo mencatat data per 16 April sudah ada 28.185 pelaku UMKM resmi mendaftarkan diri dalam program BPUM tahun 2021. Mereka mendaftarkan diri secara online melalui google form yang sudah disediakan pemerintah pusat.

"Sudah ada 28.185 pelaku UMKM mendaftarkan diri dalam program BPUM tahun 2021. Tahapan setelah ini dilakukan verifikasi data," ujarnya.

Sutarmo menjelaskan, tahapan verifikasi data sangat penting dilakukan untuk melihat kelengkapan syarat dan kelayakan pelaku UMKM yang mendaftarkan diri. Mereka akan dilihat apakah layak mendapat bantuan atau tidak. "Akan dilakukan pembersihan data juga terhadap pendaftar doble, data tidak lengkap dan lainnya. Sebab masih banyak data pendaftar seperti itu," ungkapnya. **(Mam)-d**

Tali Asih Bupati untuk Atlet Berprestasi

WONOGIRI (KR) - Bupati Wonogiri Joko Sutopo memberi penghargaan kepada 30 atlet yang berprestasi dalam Popda Virtual Tingkat Jawa Tengah 2021. Wonogiri berhasil menduduki ranking 6 tingkat provinsi dalam event yang diadakan di Semarang, 8-9 April 2021.

Atas capaian menggembirakan tersebut Bupati menyerahkan tali asih berupa tabungan kepada 15 atlet yang berhasil menorehkan prestasi menggembirakan dalam Popda virtual itu. Ikut menyaksikan penyerahan penghargaan di Pendapa Rumah Dinas Bupati Wonogiri tersebut antara lain Ketua KONI, Kepala Dinas P dan K serta Plt Kepala Disparpora setempat.

Plt Kepala Disparpora Wonogiri FX Pranata AP MHum melaporkan, 30 atlet Kota Sukses tampil gemilang dalam pekan olahraga daerah Provinsi Jawa Tengah yang mempertandingkan 8 cabor yakni silat, yudo, karate, tarung drajat, wushu, teakwondo, kempo, senam ritmik serta senam.

"Dari delapan cabor dilombakan atlet Wonogiri mengikuti 4 cabor yakni silat, judo, tarung drajat dan karate," kata Pranata, Jumat (16/4). Ditambahkan, medali yang disabet Wonogiri masing-masing 3 emas, 1 perak dan 3 medali perunggu.

Bupati Wonogiri Joko Sutopo menyatakan pihaknya berkomitmen untuk memberikan perhatian dan pembinaan kepada olahragawan yang telah mengangkat nama daerah dengan segala keterbatasan dana yang dimiliki. "Insan olahraga berprestasi kami beri waktu seluas-luas untuk berdialog, komunikasi den bupati kapanpun, mereka layak mendapat perhatian agar tetap setia membela nama Wonogiri sehingga tidak mudah tergiur pindah ke luar daerah," kata pria yang akrab disapa Mas Jekek saat ditemui wartawan usai acara. **(Dsh)-d**

Larangan Sambungan hal 1

Doni mengatakan adanya aturan pemerintah untuk melarang kegiatan mudik itu murni untuk memutus mata rantai penularan Covid-19 yang berpotensi dibawa masyarakat dari satu daerah ke daerah lain.

"Mobilisasi orang dari suatu daerah ke daerah lain dalam jumlah yang besar itu sama dengan menimbulkan potensi, mengantarkan Covid-19 ke daerah yang landai," tuturnya.

Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin mendukung keputusan pemerintah yang melakukan pelarangan mudik pada 6-17 Mei 2021 bagi seluruh masyarakat tanpa terkecuali. Langkah itu menurut dia upaya memutus mata rantai penyebaran Covid-19 yang masih tinggi dan menyelamatkan sanak keluarga dari virus Korona.

"Mari ikuti anjuran pemerintah untuk kebaikan kita bersama, tentunya keputusan larangan mudik telah melalui kajian dan pertimbangan yang matang dari Presiden Jokowi," kata Azis Syamsuddin.

Dia menjelaskan pernyataan Presiden seiring dengan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) yang menyatakan bahwa dunia saat ini sedang mengalami kegentingan Covid-19. Hal itu menurut dia dikuatkan dengan adanya sidang komite darurat WHO pada Kamis (15/4) yang diinformasikan oleh Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus yang menegaskan bahwa kasus Covid-19 mendekati level tertinggi pada tahun 2021.

"Beberapa negara telah mengalami kenaikan signifikan seperti di Brasil, India dan Papua Nugini, sementara pemerintah Indonesia perlahan berhasil menurunkan angka penyebaran dan terus angka peningkatan kesembuhan. Jangan sampai kerja keras pemerintah untuk mengakhiri pandemi justru kita abaikan," ujarnya.

Dia menilai masyarakat harus belajar dari pengalaman data libur Idul Fitri pada tahun 2020, yaitu kasus Covid-19 mengalami kenaikan sebanyak 33 persen dan kematian 66 persen.

Menurut politisi Partai Golkar itu, Pemerintah perlu menjaga penurunan kasus pandemi Covid-19 agar tidak kembali meningkat. "Mari bersama seluruh lapisan masyarakat berikhtiar memutus mata rantai penularan Covid-19, sehingga dapat mewujudkan Indonesia sehat, ekonomi bangkit dan masyarakat sejahtera," katanya. **(Ati/Ant)-d**

SUKOHARJO (KR) - Pemkab Sukoharjo mewajibkan pemudik menunjukkan surat keterangan sehat hasil rapid test antigen dan dilakukan karantina selama lima hari. Pemudik yang tidak bisa menunjukkan syarat tersebut maka wajib dikarantina selama 14 hari. Pengawasan juga akan diperketat hingga tingkat RT/RW sebagai antisipasi masuknya pemudik. Sebab dikhawatirkan banyak pemudik mencuri start sebelum Lebaran sudah mudik duluan.

Bupati Sukoharjo Etik Suryani, Sabtu (17/4) mengatakan, Pemkab Sukoharjo mewaspadai ulah pemudik yang melakukan curi start dengan mudik lebih dahulu sebelum Lebaran. Hal ini rawan terjadi setelah pemerintah pusat menetapkan kebijakan larangan mudik Lebaran pada 6-17 Mei mendatang. Pemudik kemungkinan memilih mudik lebih dulu sebelum aturan tersebut diterapkan.

Pemkab Sukoharjo terkait hal tersebut kemudian membuat kebijakan daerah sendiri dengan melakukan upaya pencegahan dan penanganan. Bentuk pencegahan dilakukan dengan gencar melakukan sosialisasi ke masyarakat. Etik Suryani mengatakan turun langsung sendiri memberikan edukasi dan sosialisasi pada masyarakat

kat untuk meminta kepada keluarga atau saudara dan termasuk warga itu sendiri untuk tidak mudik Lebaran. Hal itu dimaksudkan untuk meminimalisasi pergerakan pemudik atau orang luar daerah masuk ke Sukoharjo. Sebab hal itu rawan menjadi penyebab penyebaran virus Korona.

Pemkab Sukoharjo juga memiliki kebijakan penanganan terkait mudik Lebaran dengan melakukan pengawasan ketat hingga tingkat RT/RW. Pemerintah desa, kelurahan dan kecamatan diminta aktif memantau pergerakan kedatangan pemudik di wilayahnya masing-masing. Pemudik tersebut apabila sudah telanjur datang maka wajib dicatat dan dilaporkan identitasnya ke Gugus Tugas Pencepatan Penanganan

Virus Korona Sukoharjo. Selain itu pemudik juga wajib menunjukkan surat keterangan sehat hasil rapidtest antigen dan dilakukan karantina selama lima hari. Pemudik yang tidak bisa menunjukkan syarat tersebut maka wajib dikarantina selama 14 hari.

Kebijakan surat keterangan sehat hasil rapid test antigen sudah disosialisasikan Pemkab Sukoharjo ke petugas terkait. Hal ini dijadikan pegangan saat melakukan kegiatan pencegahan penyebaran virus Korona dengan sasaran pemudik.

Petugas nantinya juga akan meminta pada pemudik menjalani karantina di tempat yang sudah disediakan. Hal itu dilakukan untuk memastikan kondisi kesehatan pemudik apabila terpaksa

Anggaran Pusat Batal, Revitalisasi Pasar Purwosari Dibiayai APBD

SOLO (KR) - Revitalisasi Pasar Purwosari akhirnya menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), menyusul kucuran dana dari pemerintah pusat yang seharusnya cair pada tahun 2020 lalu dibatalkan, karena dialihkan untuk penanganan Covid-19.

Pada tahun 2020 lalu, bangunan lama telah dirobohkan, dan para pedagang sudah dipindahkan ke pasar darurat.

Kepala Dinas Perdagangan (Disdag) Heru Sunardi, menjawab wartawan, di balai kota, Jumat (16/4), mengungkapkan, revitalisasi Pasar Purwosari memang sempat tertunda selama satu tahun, akibat pandemi Covid-19. Pada tahun 2020 lalu, Kementerian Perdagangan (Kemndag) telah mengalokasikan anggaran bagi revitalisasi pasar tradisional

yang berada di tepi Jalan Protokol Slamet Riyadi tersebut. Namun mendadak dibatalkan terkait *refocusing* anggaran di tingkat pemerintah pusat bagi penanganan Covid-19.

Begitu anggaran dari pemerintah pusat dibatalkan, tambah Heru, Pemerintah Kota (Pemkot) Solo memutuskan untuk membiayai revitalisasi melalui APBD 2021, dengan asumsi pemerintah pusat masih memfokuskan anggaran pada penanganan Covid-19. "Usulan anggaran revitalisasi Pasar Purwosari telah ditetapkan DPRD, dan saat ini memasuki tahap awal pelaksanaan berupa penandatanganan kontrak pengerjaan konstruksi dengan pemenang lelang," ujarnya sembari menyebut, proses pembangunan diproyeksikan rampung pada

Oktober mendatang.

Menjawab pertanyaan desain bangunan terkait perubahan sumber pembiayaan, Heru menyebutkan, kendati dilakukan revisi pada beberapa bagian, namun pada prinsipnya tak banyak bergeser dari rencana semula. Revisi paling besar terjadi pada penyediaan areal parkir yang lebih luas agar mampu menampung kendaraan pedagang maupun pengunjung yang lebih. Sedangkan areal parkir, ditempatkan pada sisi Selatan pasar melalui jalan kampung guna menghindari kemungkinan gangguan lalu lintas, jika ditempatkan di sisi Utara yang berbatasan langsung dengan Jalan Slamet Riyadi.

Selain itu, menurut Heru, juga terjadi pengurangan luasan beberapa kios menyesuaikan keterse-

diaan lahan. Tentang hal itu telah dikomunikasikan dengan pedagang, dan mereka bisa memahami kondisi riil lapangan. Demikian hanya dengan penundaan proses pembangunan yang semula diproyeksikan rampung akhir 2020 lalu, namun mundur hingga Oktober 2021 depan, akibat pandemi Covid-19.

Begitu bangunan baru rampung, pedagang langsung ditempatkan pada kios masing-masing, sehingga jalan kampung yang selama ini dijadikan areal pasar darurat dapat difungsikan kembali seperti sediakala. Selain itu, para pedagang juga menginginkan segera dapat ditempatkan di pasar baru, karena selama dua tahun menempati pasar darurat yang sedikit banyak berdampak pada omzet penjualan. **(Hut)-d**

Pekarangan Sumber Penghasilan



KR-Zaini Arrosyid

Bupati Temanggung menyerahkan bantuan bibit tanaman untuk warga.

lurahan Madureso Temanggung. Bantuan yang diserahkan untuk warga di antaranya vanili, terung, jahe dan benih lele.

Bantuan itu selanjutnya diserahkan kepada warga, terutama kelompok dasawisma.

"Pertanian pekarang ha-

rus digiatkan karena sangat besar manfaatnya, baik untuk lingkungan alam maupun menambah pendekatan keluarga," tandasnya.

Bupati berharap warga Kelurahan Madureso dapat menjadi pelopor di bidang pengembangan vanili di tanah pekarangan. Bahkan saat ini belum ada desa yang secara khusus memilih budidaya vanili.

"Jika Madureso mau, nanti tiap rumah menangkarkan lagi vanili, sehingga Madureso terkenal sebagai pelopor tani pekarangan vanili," harapnya.

Pada kesempatan itu, Bupati minta kepada warga untuk menjaga kesehatan dan tetap menerapkan protokol kesehatan untuk mencegah penularan Covid-19.

Pemerintah juga sedang menggiatkan perekonomian agar bangkit lebih baik dan dapat berjalan sesuai alur, jika semua pihak menjaga kesehatan dan menghindari paparan Covid-19.

"Dengan demikian, perekonomian bangkit positif dan kesehatan tetap terjaga," tegas Al Khadziq.

(Osy)-d

Sambungan hal 1

hasil tracing kontak kasus positif, 38 kasus periksa mandiri dan 11 kasus belum ada informasi riwayat penularan," ujarnya.

Berty menegaskan penambahan kasus terkonfirmasi positif harian masih mengalami fluktuatif berdasarkan laporan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten/Kota dan Rumah Sakit (RS) Rujukan Covid-19 di DIY. Sehingga masyarakat DIY tetap diminta disiplin melakukan protokol kesehatan 5 M dengan baik.

"Jumlah sampel diperiksa sebanyak 820 sampel dari 776 orang di DIY. Case recovery rate (CRR)

atau tingkat kesembuhan sebanyak 84,90 persen dan Case Fatality Rate (CFR) atau tingkat fatalitas kasus pasien terkonfirmasi positif Covid-19 sebanyak 2,43 persen di DIY," jelasnya.

Kepala Bidang (Kabid) Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinkes DIY ini menegaskan jumlah ketersediaan Tempat Tidur (TT) di 27 Rumah Sakit (RS) Rujukan Covid-19 di DIY sudah ditambah bahkan mencapai 1.101 bed saat ini. Tingkat keterisian bed RS Rujukan Covid-19 mencapai 39,42 persen.

(Ria/Ira)-d